



## **EVALUASI PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT TAHAP I**

Dewi Restu Mangeswuri\*

### Abstrak

*Salah satu komitmen dalam membangun infrastruktur pendidikan dasar adalah pelaksanaan pembangunan dan renovasi Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi model pendidikan berbasis komunitas yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat marginal. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi capaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I, menganalisis hambatan, serta upaya mengatasinya. Proyek ini menunjukkan progres yang positif dengan capaian fisik nasional sebesar 83 persen per Juni 2025, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti pengadaan meubelair yang kompleks, aksesibilitas lokasi, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Komisi V DPR RI direkomendasikan untuk memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan inspeksi langsung ke lokasi pembangunan guna memastikan kualitas, ketepatan waktu penyelesaian dan mendorong kementerian mitra, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan agar menyediakan akses pendukung seperti jalan dan moda transportasi menuju lokasi sekolah. Dengan dukungan optimal dari DPR RI, khususnya Komisi V, proyek ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.*

### **Pendahuluan**

Pendidikan yang bermutu dan merata penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam upaya menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang kerap terpinggirkan dari akses pendidikan formal, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menetapkan pembangunan dan renovasi Sekolah Rakyat sebagai salah satu proyek strategis nasional. Program ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana pendidikan alternatif yang layak, berkualitas, dan terjangkau di berbagai wilayah, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sebagai pelaksana utama, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berkomitmen menyelesaikan Tahap I, yang mencakup renovasi 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun bersumber dari APBN (Kementerian PU, 2025). Selain itu, Kementerian PU juga tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, hingga total akan ada 200 sekolah.

\*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [dewi.mangeswuri@dpr.go.id](mailto:dewi.mangeswuri@dpr.go.id)

Per Juni 2025, progres nasional telah mencapai 83 persen, dengan beberapa lokasi bahkan melampaui 90 persen, seperti di Sentra Handayani, Jakarta Timur (Aji, 2025). Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras berbagai pihak, termasuk dukungan lintas kementerian dan pelibatan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi capaian progres pelaksanaan renovasi dan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I, menganalisis hambatan dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasinya.

## **Progres Pelaksanaan Sekolah Rakyat**

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun bersumber dari APBN untuk merehabilitasi dan membangun 100 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data per Juni 2025, progres fisik proyek secara nasional telah mencapai 83 persen, dengan beberapa lokasi seperti di Sentra Handayani, Jakarta Timur mencapai 92 persen (Kementerian PU, 2025). Rata-rata titik lainnya berada pada kisaran 88–90 persen.

Lokasi yang segera akan melaksanakan program Sekolah Rakyat dalam waktu dekat di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua (Tifani, 2025). Sekolah Rakyat tahap I mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik) (Dinar, 2025).

Program renovasi dan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang bertujuan untuk menjamin pendidikan bermutu bagi kelompok termarginalkan yang sering kali tertinggal dari intervensi pendidikan formal. Jika berhasil, program ini akan menjadi model untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung percepatan pengurangan kemiskinan melalui pendekatan berbasis layanan dasar, khususnya pendidikan.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari selesainya bangunan, melainkan pada fungsionalisasi dan keberlanjutan pemanfaatannya. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I menjadi cerminan dari pendekatan integratif antara infrastruktur fisik dan kebijakan sosial.

## **Implementasi Program Sekolah Rakyat**

Program ini tidak hanya berdampak pada penyediaan sarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja lokal. Setiap lokasi proyek melibatkan lebih dari 100 pekerja, dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bergantian selama 24 jam dalam dua bulan terakhir (Suhalela & Hilda, 2025). Namun, proses

pelaksanaan proyek juga menghadapi tantangan teknis, salah satunya adalah pengadaan meubelair yang bersifat khusus (*customize*). Hambatan ini berpotensi mengganggu target penyelesaian jika tidak diantisipasi secara tepat waktu, terutama menjelang pelaksanaan Tahap II yang sedang dalam tahap verifikasi lokasi.

Meskipun progres pelaksanaan tergolong baik, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi renovasi sekolah rakyat tahap I, *pertama*, pengadaan meubelair yang bersifat khusus (*customize*). Desain perabot yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lokal mengakibatkan proses pengadaan lebih lama dari konstruksi fisik. Ini menjadi hambatan dalam penyelesaian sarana belajar secara menyeluruh (Aji, 2025).

*Kedua*, koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Keterlibatan lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses pengawasan serta pemanfaatan hasil pembangunan Sekolah Rakyat harus berjalan secara sinergis. Ketidakterpaduan ini dapat menghambat efektivitas program dan mengurangi dampak positif yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat sasaran. Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sejahtera dan berkualitas (Suhalela dan Hilda, 2025).

*Ketiga*, aksesibilitas lokasi. Beberapa lokasi Sekolah Rakyat berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur jalan, yang menyulitkan proses mobilisasi material konstruksi maupun distribusi meubelair. Kondisi ini tidak hanya memperlambat pelaksanaan pembangunan, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya logistik dan menghambat kesiapan operasional sekolah. *Keempat*, kesiapan operasional pascarenovasi. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam hal ketersediaan guru, tenaga pendukung, serta sistem pengelolaan sekolah. Ketidaksiapan ini dapat menghambat fungsi sekolah secara optimal meskipun pembangunan fisik telah selesai, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif sejak tahap awal proyek.

### **Upaya untuk Mengatasi Hambatan**

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah pemerintah yang patut diapresiasi sebagai upaya memberikan akses pendidikan kepada kelompok marginal. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada desain kebijakan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, dan sinergi antarpemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang tepat, program ini dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung keberhasilan program ini antara lain, *pertama* penguatan sistem pengadaan terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang mekanisme pengadaan meubelair yang selaras dengan jadwal pelaksanaan konstruksi fisik, sehingga proses pengadaan dapat berjalan secara paralel. Pendekatan ini telah diterapkan pada pelaksanaan Tahap II yaitu pengadaan meubelair yang

dimulai lebih awal sebelum pembangunan fisik dilaksanakan (Kementerian PU, 2025). *Kedua*, pemetaan kebutuhan pasca pembangunan. Kebijakan ini mencakup pelibatan Kemendikbudristek sejak tahap akhir proses pembangunan untuk menyiapkan tenaga pendidik, kurikulum, serta sistem operasional sekolah. Terkait dengan tenaga pendidik, Tim Formatur Sekolah Rakyat telah melakukan seleksi tenaga pengajar bersamaan dengan jadwal penerimaan murid Sekolah Rakyat, yakni pada April 2025 lalu (Tifani, 2025).

*Ketiga*, peningkatan interkoneksi antarprogram. Upaya ini dilakukan dengan menyelaraskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dengan program penanggulangan kemiskinan ekstrem serta program transportasi perdesaan. Sinergi antarsektor ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas siswa, terutama dari wilayah terpencil atau rentan, sehingga mereka dapat menjangkau sekolah dengan lebih mudah dan aman. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tujuan utama memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih cerah bagi rakyat kecil (Aji, 2025). *Keempat*, evaluasi dan pelibatan masyarakat. Kebijakan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses evaluasi efektivitas operasional Sekolah Rakyat setelah dibuka. Partisipasi aktif warga tidak hanya membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan, sehingga mendukung keberlanjutan dan relevansi sekolah dengan kebutuhan komunitas setempat.

Sebagai mitra kerja Kementerian PU, Komisi V DPR RI memiliki peran penting dalam mengawal keberhasilan program ini melalui fungsi pengawasan, yaitu dengan melakukan kunjungan kerja ke titik-titik pelaksanaan proyek untuk menilai progres riil dan memastikan kualitas pelaksanaan sesuai rencana. Fungsi anggaran, yaitu dengan mendorong alokasi anggaran lanjutan untuk Tahap II pembangunan Sekolah Rakyat dalam pembahasan RAPBN 2026, termasuk dana untuk pengadaan meubelair dan infrastruktur pendukung. Fungsi legislasi, yaitu dengan mendorong lahirnya regulasi atau revisi peraturan terkait penyediaan infrastruktur pendidikan alternatif di luar jalur formal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

## Penutup

Pembangunan dan renovasi Sekolah Rakyat Tahap I merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Proyek ini menunjukkan progres yang positif dengan capaian fisik nasional sebesar 83 persen per Juni 2025, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti pengadaan meubelair yang kompleks, aksesibilitas lokasi, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Peran aktif Komisi V DPR RI diperlukan guna memastikan program ini memberikan dampak bagi masyarakat sasaran. Untuk itu, penting bagi Komisi V DPR RI melakukan pengawasan lapangan secara berkala guna memastikan pembangunan sesuai jadwal, mutu, dan sasaran; mendorong percepatan pengadaan meubelair dengan menyesuaikan sistem pengadaan dan pelaksanaan fisik agar berjalan paralel; menyelaraskan alokasi anggaran infrastruktur pendidikan alternatif dalam pembahasan RAPBN 2026, khususnya untuk Tahap II Sekolah Rakyat; dan terakhir

meningkatkan koordinasi lintas komisi dan mitra kerja kementerian terkait, untuk memastikan sinergi program pendidikan, sosial, dan infrastruktur berjalan optimal.

## Referensi

- Cakti, Aji. (2025, Juni 30). Menteri PU pastikan renovasi sekolah rakyat tahap I selesai pada juli. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4932397/menteri-pu-pastikan-renovasi-sekolah-rakyat-tahap-i-selesai-pada-juli>
- Dinar, Karina. (2025, Juni 30). Renovasi 100 sekolah rakyat tahap I selesai juli, biayanya Rp1 t. *kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/ekonomi/602426/renovasi-100-sekolah-rakyat-tahap-i-selesai-juli-biayanya-rp1-t>
- Kementerian PU. (2025, Juni 30). Menteri PU, Mensos, dan Seskab pastikan renovasi sekolah rakyat tahap I rampung juli 2025. *pu.go.id*. <https://pu.go.id/berita/menteri-pu-mensos-dan-seskab-pastikan-renovasi-sekolah-rakyat-tahap-i-rampung-juli-2025>
- Suhalela, B dan Hilda, B. (2025, Juni 30). Bangun sekolah rakyat tahap II, Menteri Dody verifikasi lokasi. *kompas.com*. <https://www.kompas.com/properti/read/2025/06/30/133000121/bangun-sekolah-rakyat-tahap-ii-menteri-dody-verifikasi-lokasi->
- Tifani. (2025, Juni 30). Apa itu sekolah rakyat yang akan dimulai pada 14 Juli 2025?. *katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/lifestyle/edukasi/68622ce867ee0/apa-itu-sekolah-rakyat-yang-akan-dimulai-pada-14-juli-2025>

